

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PADA DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

by Gea Mahatri

Submission date: 22-Feb-2024 11:55PM (UTC-0500)

Submission ID: 2302218741

File name: Mahtri_Gea_-_BAB_I_-_BAB_V.docx (163.04K)

Word count: 12305

Character count: 86543

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI
PADA DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI**

SKRIPSI



Oleh:

NAMA: MAHATRI GEA

NIM: 2319307

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dan efektivitas layanan publik di Indonesia selalu menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas adalah melalui sistem monitoring dan evaluasi (M&E). Dalam pelayanan sosial, Dinas Sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi adalah dua aspek penting dalam manajemen program sosial. Monitoring adalah proses pengumpulan data secara berkala untuk memastikan bahwa program sedang berjalan sesuai dengan perencanaan awal. Sementara evaluasi adalah proses penilaian mendalam terhadap hasil dan dampak program, sehingga dapat diidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program tersebut.

Menurut Fietri dan Ilham (2021:25) Monitoring adalah sebuah siklus kegiatan yang meliputi proses pengumpulan, peninjauan ulang pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Sedangkan menurut World Bank (2015) Sistem monitoring adalah proses yang berkelanjutan dan terstruktur yang mencakup pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pelaporan informasi yang relevan untuk mengukur kemajuan, kinerja, atau dampak dari suatu program, proyek, atau kebijakan.

Evaluasi adalah salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, serta kinerja atau produktivitas suatu satuan lembaga dalam melaksanakan suatu program. Menurut (Zein& Darto. 2012:7) Evaluasi kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli memiliki tujuan untuk membantu warga kota yang membutuhkan, seperti bantuan sosial, program rehabilitasi sosial, dan

program lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Dalam mengelola dan melaksanakan program-program tersebut, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli perlu memastikan bahwa program-program sosial yang mereka jalankan berjalan dengan baik, efisien, dan memberikan dampak positif yang sesuai dengan tujuannya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem yang memadai dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap program-program sosial yang ada.

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program sosial, memperbaiki program yang kurang efektif, serta mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat. Namun, pengembangan dan implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan sosial, teknologi informasi, dan kemampuan manajerial untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal.

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi adalah suatu proses yang terdiri dari berbagai langkah dan metode untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi terkait pelaksanaan program-program sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Proses ini bertujuan untuk memahami pencapaian tujuan program, mengukur dampak sosial, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Sistem monitoring mengacu pada pengumpulan data secara berkala sepanjang pelaksanaan program, sedangkan evaluasi merujuk pada analisis mendalam terhadap pencapaian tujuan program secara menyeluruh.

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting bagi instansi pemerintahan, termasuk Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat, termasuk melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kota ini. Oleh karena itu, penting bagi Dinas Sosial untuk memiliki sistem yang efisien dan efektif

dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program sosial yang mereka jalankan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, permasalahan pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli adalah kurangnya efektivitas program sosial, keterbatasan data dan informasi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dan keterbatasan sumber daya.

Tabel 1.1

No	Permasalahan Utama	Perkembangan Implementasi	Tindakan Perbaikan yang Diambil	Tahun
1	Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai penerima manfaat program sosial di Kota Gunungsitoli.	Implementasi sistem monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya berjalan efektif.	1. Melakukan pelatihan lebih lanjut kepada petugas monitoring dan evaluasi. 2. Meningkatkan sistem4or data dengan dinas terkait.	2020
2	Masih terdapat kesenjangan dalam capaian target program sosial yang diharapkan.	Implementasi sistem monitoring dan evaluasi telah mengalami beberapa peningkatan, tetapi masih belum optimal.	1. Meninjau kembali sistem monitoring kinerja dan target program sosial. 2. Memperbarui metode pengumpulan data.	2021
3	Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi	Terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan	1. Merekrut tenaga ahli tambahan. 2. Investasi dalam teknologi yang	2022

dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi	system monitoring dan evaluasi.	mempermudah pengumpulan dan analisis data.	
--	---------------------------------	--	--

Sumber data: Dinas Sosial Kota Gunungsitoli 2023

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul “Analisis Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah

1. Implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
2. Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli
3. Faktor – faktor pendukung implementasi system monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli?
2. Apa saja keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli?
3. Apa saja faktor – faktor pendukung implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

2. Untuk mengetahui saja keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor pendukung implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Bagi Teoritis:
 - a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis dengan menganalisis implementasi sistem monitoring dan evaluasi dalam konteks Dinas Sosial. Ini dapat membantu memahami isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan program sosial dan manajemen data di tingkat pemerintahan lokal.
 - b) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori atau kerangka konseptual dalam bidang manajemen program sosial, evaluasi kinerja, atau tata kelola pemerintahan. Ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi teoritis dan peneliti di masa depan.
2. Manfaat Bagi Praktis:
 - a) Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli tentang kendala dan permasalahan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan program sosial. Dengan demikian, mereka dapat mengambil tindakan konkret untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut.
 - b) penelitian dapat membantu Dinas Sosial dalam merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih efektif. Ini termasuk perbaikan dalam pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan berdasarkan temuan evaluasi.
 - c) pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan solusi yang diidentifikasi melalui penelitian, Dinas Sosial dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program sosial mereka. Ini dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat.

- d) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, termasuk lembaga akademis, organisasi non-pemerintah, atau lembaga donor, dalam upaya meningkatkan pelayanan sosial dan tata kelola yang lebih baik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan rencana, kebijakan, atau program secara nyata dalam praktik atau aksi di lapangan. Implementasi mencakup serangkaian langkah konkret untuk mengubah gagasan atau keputusan menjadi tindakan yang dapat dijalankan dalam situasi nyata.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.1.2 Tujuan Implementasi

Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan atau menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau program secara efektif dalam praktik di lapangan. Proses implementasi bertujuan untuk mengubah gagasan atau keputusan menjadi tindakan konkret yang dapat dijalankan oleh individu, kelompok, atau organisasi.

Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Taufik dan Isril menggarisbawahi pentingnya tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah diprogramkan. Dalam konteks kebijakan publik atau program, beberapa poin penting yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah:

1. Implementasi sebagai kunci kesuksesan; Implementasi menjadi titik kritis dalam menyampaikan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Banyak kebijakan yang gagal mencapai sasarannya karena implementasi yang kurang efektif atau tidak memadai.
2. Tindakan nyata; Keberhasilan implementasi tergantung pada tindakan nyata yang diambil untuk menjalankan kebijakan tersebut. Itu berarti melaksanakan rencana dan keputusan secara konkret di lapangan.
3. Memuaskan tujuan; Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya mencapai kepuasan dalam implementasi kebijakan. Ini berarti bahwa implementasi harus mencapai hasil yang sesuai dengan arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil yang memuaskan menunjukkan bahwa implementasi telah berhasil menyampaikan manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut.
4. Monitoring dan evaluasi; Untuk menilai sejauh mana kebijakan berhasil diimplementasikan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, monitoring dan evaluasi yang tepat perlu dilakukan secara teratur. Ini membantu mengidentifikasi hambatan atau perubahan yang

diperlukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan di masa depan.

2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Jeffrey L. Brudney dan Mark W. Edwards (2009) mengidentifikasi faktor-faktor seperti kepemimpinan, komitmen organisasi, dukungan anggaran, dan partisipasi pemangku kepentingan sebagai faktor penting dalam implementasi kebijakan pemerintah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mereka identifikasi:

1. **Kepemimpinan;** Kepemimpinan yang kuat dan efektif sangat penting dalam memandu dan mengarahkan implementasi kebijakan pemerintah. Pemimpin yang kompeten dan berkomitmen akan mampu memotivasi tim implementasi, mengatasi hambatan, dan menjaga fokus pada tujuan implementasi.
2. **Komitmen Organisasi;** Komitmen dari seluruh organisasi atau lembaga terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan sangat penting. Jika organisasi sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, maka pelaksanaan akan lebih lancar. Komitmen ini dapat tercermin dalam berbagai bentuk dukungan, termasuk dukungan dari tingkat manajemen hingga pekerja lapangan.
3. **Dukungan Anggaran;** Dukungan finansial dari pemerintah atau organisasi untuk implementasi kebijakan merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa anggaran yang cukup, sulit untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Dukungan anggaran mencakup alokasi dana yang memadai untuk keperluan implementasi, seperti sumber daya manusia, teknologi, dan fasilitas.
4. **Partisipasi Pemangku Kepentingan;** Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan dalam proses implementasi dapat meningkatkan tingkat dukungan dan akseptabilitas kebijakan. Partisipasi pemangku kepentingan dapat membantu mengidentifikasi

masalah potensial, memperkuat komunikasi, dan memastikan bahwa perspektif beragam dipertimbangkan.

Faktor-faktor ini, seperti yang diidentifikasi oleh Brudney dan Edwards, saling terkait dan dapat memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan pemerintah. Kepemimpinan yang efektif dapat membantu membangun komitmen organisasi dan mendapatkan dukungan anggaran yang diperlukan, sementara partisipasi pemangku kepentingan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam praktiknya, koordinasi yang baik antara semua faktor ini menjadi kunci untuk mencapai implementasi yang sukses dan efisien.

2.2 Konsep Sistem Monitoring

2.2.1 Pengertian Sistem Monitoring

Menurut Fietri dan Ilham (2021:25) Monitoring adalah sebuah siklus kegiatan yang meliputi proses pengumpulan, peninjauan ulang pelaporan dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan monitoring sebagai proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dan informasi mengenai pelaksanaan program, proyek, atau kebijakan guna menentukan kemajuan menuju pencapaian tujuan dan hasil yang diharapkan.

Menurut International Development Research Centre (IDRC): IDRC mendefinisikan monitoring sebagai pengumpulan data secara berkala selama pelaksanaan program atau proyek untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan memungkinkan tindakan perbaikan.

Menurut David J. Grimshaw (2005) menyoroti pentingnya proses pengumpulan informasi yang terus-menerus, analisis data, dan pelaporan hasil dalam rangka mendukung manajemen program atau proyek, serta untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Menurut European Commission (EC) monitoring adalah proses pemantauan dan pengumpulan data berkala untuk menilai kemajuan dan hasil pelaksanaan program atau proyek, serta untuk memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

Berdasarkan pendapat yang diberikan dari berbagai sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. UNDP menekankan bahwa monitoring adalah proses yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan pelaporan data dan informasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program, proyek, atau kebijakan guna mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.
2. Fietri dan Ilham menambahkan bahwa monitoring adalah siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan informasi, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi tersebut selama proses implementasi.
3. IDRC menekankan bahwa monitoring melibatkan pengumpulan data secara berkala selama pelaksanaan program atau proyek dengan tujuan untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan dasar untuk tindakan perbaikan.
4. David J. Grimshaw menyoroti pentingnya pengumpulan informasi yang berkelanjutan, analisis data, dan pelaporan hasil dalam mendukung manajemen program atau proyek dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.
5. European Commission (EC) menggambarkan monitoring sebagai proses pemantauan dan pengumpulan data berkala untuk menilai kemajuan dan hasil pelaksanaan program atau proyek serta untuk memungkinkan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam intinya, monitoring adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dan informasi secara berkala selama pelaksanaan program, proyek, atau kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memberikan dasar bagi pengambilan tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring merupakan bagian integral dalam manajemen yang

membantu memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

2.2.2 Tujuan Sistem Monitoring

Sistem monitoring memiliki berbagai tujuan, tergantung pada konteksnya. Tujuan umum dari sistem monitoring adalah untuk memantau, mengukur, dan mengumpulkan data tentang suatu proses atau aktivitas dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, mengoptimalkan kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut James Turnbull (2010), tujuan sistem monitoring adalah untuk "mengukur performa dan kesehatan sistem secara konsisten dan menyeluruh." Ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang akurat tentang bagaimana sistem beroperasi dan mendeteksi masalah dengan cepat.

Menurut Len Bass, Ingo Weber, dan Liming Zhu (2015): Para penulis ini mengemukakan dalam buku "DevOps: A Software Architect's Perspective" bahwa tujuan monitoring adalah "mengukur, memahami, dan mengelola kualitas layanan yang diberikan oleh sistem." Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan.

Menurut Ethan Garofolo dan Andreas M. Hinz (2016) Dalam makalah mereka yang berjudul "Monitoring and Control in Cyber-Physical Systems: A Survey," mereka menyebutkan bahwa tujuan monitoring dalam sistem cyber-fisik adalah "mengawasi operasi sistem secara real-time untuk mendeteksi dan mengatasi anomali serta memastikan kinerja yang baik."

Menurut Nicolae Sfetcu (2014) Dalam bukunya yang berjudul "Monitoring and Control of Information-Poor Systems," Sfetcu menyatakan bahwa tujuan monitoring adalah "mengumpulkan data, menganalisis data tersebut, dan mengambil tindakan berdasarkan analisis tersebut untuk mengoptimalkan kinerja sistem."

Menurut Bryan Langston dan Michael Bauer (2012): Dalam artikel mereka yang berjudul "Effective Monitoring and Alerting," mereka menekankan bahwa tujuan utama monitoring adalah "mendeteksi, menganalisis, dan mengatasi masalah dalam sistem secara proaktif sebelum masalah tersebut memengaruhi pengguna akhir."

Menurut Ronni Colville (2017), tujuan monitoring adalah "mengukur tingkat kualitas dan kinerja layanan TI dalam konteks penggunaan, serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan tersebut."

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem monitoring adalah:

1. Mengukur Performa dan Kesehatan Sistem secara Konsisten; Tujuan ini, seperti yang diungkapkan oleh James Turnbull, adalah untuk memantau dan mengukur secara terus-menerus bagaimana sistem beroperasi agar masalah dapat dideteksi dengan cepat.
2. Mengukur, Memahami, dan Mengelola Kualitas Layanan; Seperti yang dijelaskan oleh Len Bass, Ingo Weber, dan Liming Zhu, monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga layanan yang diberikan tetap optimal.
3. Mengawasi Operasi Sistem secara Real-time; Dalam konteks sistem cyber-fisik, monitoring bertujuan untuk mengawasi operasi sistem secara real-time, mendeteksi anomali, dan memastikan kinerja yang baik, sesuai dengan pandangan Ethan Garofolo dan Andreas M. Hinz.
4. Mengumpulkan dan Menganalisis Data untuk Optimalisasi; Tujuan yang dinyatakan oleh Nicolae Sfetcu adalah untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mengambil tindakan berdasarkan analisis tersebut guna mengoptimalkan kinerja sistem.
5. Mendeteksi, Menganalisis, dan Mengatasi Masalah secara Proaktif; Pandangan dari Bryan Langston dan Michael Bauer menekankan pentingnya deteksi dan analisis masalah secara proaktif sehingga masalah dapat diatasi sebelum berdampak negatif pada pengguna akhir.

6. Mengukur Kualitas dan Kinerja Layanan TI; Menurut Ronni Colville, monitoring bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas dan kinerja layanan TI dalam konteks penggunaan, serta memberikan wawasan yang berguna untuk meningkatkan layanan tersebut.

Secara umum, sistem monitoring digunakan untuk memantau, mengukur, dan mengelola performa sistem serta layanan yang diberikan oleh sistem tersebut, dengan fokus pada mendeteksi masalah dengan cepat dan meningkatkan kualitas layanan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, kinerja, dan kualitas layanan dalam berbagai konteks, mulai dari sistem komputer hingga sistem cyber-fisik dan layanan TI.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Sistem Monitoring

Dampak sistem monitoring, seperti halnya faktor-faktor yang mempengaruhi sistem monitoring, juga dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Namun, secara umum, dampak sistem monitoring dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan pandangan para ahli:

Menurut James Turnbull (2010) James Turnbull menyebutkan dalam bukunya "*The Art of Monitoring*" bahwa sistem monitoring yang efektif dapat membantu organisasi untuk mendeteksi masalah dengan cepat, mengurangi downtime, dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan kepada pengguna. Dampaknya adalah peningkatan kinerja dan kehandalan sistem.

Menurut Len Bass, Ingo Weber, dan Liming Zhu (2015) Para penulis ini dalam buku "*DevOps: A Software Architect's Perspective*" menyoroti bahwa sistem monitoring yang baik dapat membantu organisasi untuk memahami dan mengelola kualitas layanan yang diberikan oleh sistem. Dampaknya adalah peningkatan kepuasan pelanggan dan pemenuhan persyaratan kualitas.

Menurut Ethan Garofolo dan Andreas M. Hinz (2016); Dalam konteks sistem cyber-fisik, sistem monitoring dapat mempengaruhi keselamatan dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dampak positifnya adalah mencegah kegagalan sistem dan mendukung operasi yang aman.

Menurut Nicolae Sfetcu (2014) Nicolae Sfetcu menyoroti bahwa sistem monitoring dapat membantu organisasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan, menganalisis data tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Dampaknya adalah efisiensi operasional dan penghematan biaya.

Menurut Bryan Langston dan Michael Bauer (2012); Dalam artikel mereka tentang "Effective Monitoring and Alerting," Langston dan Bauer menekankan bahwa sistem monitoring yang proaktif dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi masalah sebelum berdampak negatif pada pengguna akhir. Dampaknya adalah mengurangi dampak masalah pada produktivitas dan reputasi organisasi.

Ronni Colville (2017); Ronni Colville dari Gartner mengatakan bahwa sistem monitoring dapat membantu organisasi mengukur dan meningkatkan kualitas layanan TI. Dampaknya adalah peningkatan keefektifan dan efisiensi dalam pengiriman layanan TI.

Menurut pandangan para ahli yang telah disebutkan di atas maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja dan Keandalan Sistem; Sistem monitoring yang efektif, seperti yang disarankan oleh James Turnbull, berkontribusi pada mendeteksi masalah dengan cepat, mengurangi downtime, dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga meningkatkan kinerja dan keandalan sistem.
2. Peningkatan Kepuasan Pelanggan dan Pemenuhan Kualitas; Sistem monitoring yang baik, sebagaimana ditekankan oleh Len Bass, Ingo Weber, dan Liming Zhu, membantu organisasi memahami dan mengelola kualitas layanan yang diberikan oleh sistem, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.
3. Peningkatan Keselamatan Sistem dan Operasi yang Aman; Dalam konteks sistem cyber-fisik, sistem monitoring, seperti yang dijelaskan oleh Ethan Garofolo dan Andreas M. Hinz, memiliki dampak positif pada keselamatan sistem dan mendukung operasi yang aman.

4. Efisiensi Operasional dan Penghematan Biaya; Sistem monitoring, sebagaimana dinyatakan oleh Nicolae Sfetcu, membantu organisasi dalam mengumpulkan data yang diperlukan, menganalisis data tersebut, dan mengambil tindakan yang tepat, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi operasional dan penghematan biaya.
5. Proaktif dalam Mengatasi Masalah dan Meningkatkan Reputasi; Seperti yang ditunjukkan oleh Bryan Langston dan Michael Bauer, sistem monitoring yang proaktif membantu organisasi mengidentifikasi masalah sebelum berdampak negatif pada pengguna akhir, yang dapat mengurangi dampak masalah pada produktivitas dan reputasi organisasi.
6. Peningkatan Keefektifan dan Efisiensi Layanan TI; Menurut Ronni Colville dari Gartner, sistem monitoring dapat membantu organisasi mengukur dan meningkatkan kualitas layanan TI, yang berdampak pada peningkatan keefektifan dan efisiensi dalam pengiriman layanan TI.

Dengan demikian, sistem monitoring yang baik memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari performa sistem hingga kepuasan pelanggan, keamanan, efisiensi operasional, dan reputasi organisasi.

2.2.4 Efektifitas Sistem Monitoring

Sistem monitoring akan memberikan dampak yang baik bila dirancang dan dilakukan secara efektif. Berikut kriteria sistem monitoring yang efektif (Mercy, 2005)

1. Sederhana dan mudah dimengerti (user friendly). Monitoring harus dirancang dengan sederhana namun tepat sasaran. Konsep yang digunakan adalah singkat, jelas, dan padat. Singkat berarti sederhana, jelas berarti mudah dimengerti, dan padat berarti bermakna (berbobot).
2. Fokus pada beberapa indikator utama. Indikator diartikan sebagai titik kritis dari suatu scope tertentu. Banyaknya indikator membuat pelaku dan obyek monitoring tidak fokus. Hal ini berdampak pada

pelaksanaan sistem tidak terarah. Maka itu, fokus diarahkan pada indikator utama yang benar-benar mewakili bagian yang dipantau.

3. Perencanaan matang terhadap aspek-aspek teknis. Tujuan perancangan sistem adalah aplikasi teknis yang terarah dan terstruktur. Maka itu, perencanaan aspek teknis terkait harus dipersiapkan secara matang. Aspek teknis dapat menggunakan pedoman 5W1H, meliputi apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan sistem monitoring.
4. Prosedur pengumpulan dan penggalian data. Selain itu, data yang didapatkan dalam pelaksanaan monitoring pada *on going process* harus memiliki prosedur tepat dan sesuai. Hal ini ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan proses masuk dan keluarnya data. Prosedur yang tepat akan menghindari proses input dan output data yang salah (tidak akurat).

2.2.5 Metode Monitoring

Monitoring dapat dilakukan melalui bermacam metode. Menurut Azis (2016:149) beberapa metode monitoring di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan dokumentasikan dan koordinasi rutin
2. Pengamatan kerja sehari-hari melalui kunjungan mendadak
3. Assement eksternal
4. Wawancara
5. Diskusi kelompok
6. Kunjungan laporan berkala
7. Survey pengumpulan data dan perbincangan kondisi sebelum dan sesudah intervensi
8. Pengamatan kerja

2.3 Konsep Evaluasi

2.3.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengevaluasi atau menilai suatu kegiatan, program, proyek, atau inisiatif guna mengukur pencapaian

tujuan, dampak, efisiensi, dan efektivitasnya. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang objektif tentang sejauh mana suatu kegiatan atau program mencapai hasil yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses atau implementasinya.

Evaluasi adalah suatu pengumpulan data dan menganalisis informasi tentang efektivitas dan dapat dari suatu tahap atau keseluruhan program (Azis, 2016:150). Ruang lingkup evaluasi juga termasuk menilai pencapaian program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan yang akan datang.

Sementara itu menurut Prihatin (dalam Azis, 2016:151) evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya terhadap peserta, lembaga, dan program/kegiatan/pekerjaan yang dievaluasi.

Menurut Subhayni (2020:4), evaluasi bermula dari istilah yang bermakna penilaian. Jika ditinjau dari segi peristilahan, evaluasi berarti sebuah aktivitas atau suatu urusan dalam menetapkan penilaian dari kejadian atau peristiwa yang ada. Dengan demikian evaluasi dapat dikatakan sebagai sebuah upaya yang berbentuk merencanakan untuk membuat suatu pilihan dalam mengambil keputusan.

Menurut Ajat Rukajat (2018:2) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penentuan keputusan tentang kualitas suatu objek atau aktivitas dengan melibatkan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Dalam buku Kadek Ayu Astiti (2017:2) evaluasi merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dan suatu kegiatan untuk

melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, serta dapat pula digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya.

2.3.2 Tujuan Evaluasi

Menurut Patton (2018) tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena atau intervensi dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan untuk perbaikan atau replikasi di masa mendatang. Evaluasi bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, pembelajaran organisasi, dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Evaluasi juga bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan lain, seperti:

1. Akuntabilitas; Evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa suatu program, kegiatan, atau intervensi bertanggung jawab atas hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang digunakan.
2. Pembelajaran organisasi; Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat pembelajaran dalam organisasi. Hasil evaluasi memberikan wawasan tentang keberhasilan, kegagalan, dan pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan program atau kegiatan.
3. Pengambilan keputusan berbasis bukti; Hasil evaluasi memberikan bukti-bukti konkret yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan data dan informasi yang obyektif, keputusan yang diambil menjadi lebih informasional dan tepat.
4. Perbaikan program; Evaluasi membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam program atau kegiatan. Dengan demikian, evaluasi berkontribusi pada upaya meningkatkan kinerja dan efektivitas.
5. Replikasi dan skalabilitas; Evaluasi menyediakan pemahaman tentang faktor-faktor yang berhasil dalam suatu intervensi atau program sehingga dapat diterapkan di konteks lain atau ditingkatkan skala implementasinya.

Dengan berfokus pada tujuan evaluasi yang mencakup pemahaman, pembelajaran, dan perbaikan, evaluasi berperan penting dalam menginformasikan dan membentuk keputusan strategis organisasi, meningkatkan kinerja dan dampak program, serta memastikan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam pelaksanaan suatu inisiatif.

2.3.3 Proses Evaluasi

Menurut Patton (2018) Proses evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang terorganisasi untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat penilaian tentang pencapaian tujuan dan dampak suatu intervensi atau program. Proses ini mencakup perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan menginformasikan keputusan. Proses ini meliputi tiga tahapan utama:

1. Perencanaan Evaluasi
 - a) Tahap perencanaan evaluasi melibatkan penetapan tujuan evaluasi yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai dengan melakukan evaluasi.
 - b) Menentukan pertanyaan evaluasi yang akan dijawab dan indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan dampak.
 - c) Merencanakan metode pengumpulan data yang akan digunakan, sumber data yang akan dimanfaatkan, dan prosedur analisis yang akan dijalankan.
2. Pelaksanaan Evaluasi
 - a) Tahap pelaksanaan evaluasi melibatkan pengumpulan data sesuai dengan rencana evaluasi yang telah ditetapkan.
 - b) Data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen, sesuai dengan kebutuhan dan konteks evaluasi.

- c) Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pencapaian tujuan dan dampak intervensi atau program yang dievaluasi.
3. Penggunaan Hasil Evaluasi
- a) Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan evaluasi atau presentasi untuk diberikan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam program atau intervensi.
 - b) Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kinerja program atau intervensi, menginformasikan keputusan, dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat diterapkan di masa mendatang.
 - c) Proses evaluasi tidak berakhir dengan penyajian hasil, tetapi melibatkan tindakan selanjutnya berdasarkan rekomendasi evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan program.

Proses evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kinerja dan dampak suatu program atau intervensi. Hasil evaluasi juga berperan penting dalam memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam mengarahkan langkah-langkah ke depan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang.

2.3.4 Indikator Monitoring dan Evaluasi

Keberagaman sistem monitoring dan evaluasi menjadikan masing-masing pendekatan memiliki indikator yang bersifat subsistem, indikator tersebut menurut (Suhato, 2010) yaitu:

1. Masukan (input), hal yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan.
2. Proses (process), kegiatan pengolahan setelah adanya input dan sebelum menjadi hasil/output.

3. Keluaran (output), hal yang diperoleh setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun nonfisik. d.) Hasil (outcome), hasil yang telah memberi kesan bahwa hasil yang diperoleh telah berhasil/berfungsi.
4. Dampak (impact), hal yang ditimbulkan atau menjadi akibat dari tiap indikator baik yang bersifat positif ataupun negatif.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Nama peneliti Anjar Safitri, Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com. Akt. Tahun 2015, judul penelitian Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan dan Anggaran Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Universitas Gadjah Mada). Penelitian tentang implementasi monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan dan anggaran di Perguruan Tinggi dengan studi kasus di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan hubungannya dengan analisis implementasi sistem monitoring dan evaluasi pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan topik yang kompleks dan memerlukan penelitian yang mendalam. Di bawah ini saya akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana kedua topik ini dapat berhubungan dan memberikan beberapa poin yang mungkin relevan:
 - a) Tujuan dan Ruang Lingkup; Penelitian di Universitas Gadjah Mada mungkin bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bagaimana kegiatan dan anggaran di perguruan tinggi tersebut dikelola, diawasi, dan dievaluasi. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti alokasi dana, efisiensi penggunaan anggaran, dan pencapaian tujuan pendidikan.
 - b) Metodologi; Penelitian di UGM mungkin melibatkan wawancara dengan staf dan pengambil keputusan, analisis data keuangan, dan survei terhadap mahasiswa dan staf untuk mengukur tingkat kepuasan dan pencapaian tujuan pendidikan. Metodologi ini akan membantu mengidentifikasi masalah dan peluang untuk meningkatkan kinerja dan penggunaan anggaran di UGM.

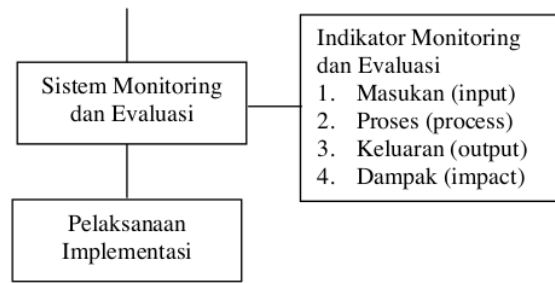
- c) Hasil Penelitian di UGM; Hasil penelitian di UGM dapat mencakup temuan tentang efektivitas kebijakan pengelolaan anggaran, tingkat transparansi dalam penggunaan dana, pengukuran kinerja staf akademik dan administratif, serta faktor-faktor penghambat atau pendorong dalam mencapai tujuan pendidikan.
 - d) Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian di UGM dapat memberikan wawasan tentang bagaimana institusi pendidikan dapat meningkatkan pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan mereka melalui sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Hal ini dapat memberikan inspirasi atau panduan bagi Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam merancang atau meningkatkan sistem mereka sendiri.
2. Nama peneliti Yolanda Mulya judul penelitian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar tahun penelitian 2019. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar adalah suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa pendidikan dasar di suatu daerah atau lembaga pendidikan memiliki standar mutu yang tinggi dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Analisis Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi (M&E) pada Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan studi terkait dengan cara pengawasan dan evaluasi program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial di wilayah tersebut, kedua hal ini dapat saling berhubungan dan mendukung:
- a) Penjaminan Mutu Internal dalam Pendidikan Dasar
 - 1) Pengembangan Standar Mutu: Implementasi SPMI dapat dimulai dengan pengembangan standar mutu pendidikan dasar yang jelas dan terukur. Standar ini harus mencakup berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran, fasilitas, dan pengelolaan sekolah.
 - 2) Pelatihan dan Pengembangan Staf: Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, staf pendidikan perlu diberikan pelatihan dan pengembangan agar dapat mengimplementasikan standar mutu yang telah ditetapkan dengan baik.

- 3) Proses Monitoring dan Evaluasi Internal: SPMI melibatkan proses yang terus-menerus untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja lembaga pendidikan terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, M&E menjadi kunci dalam mengukur pencapaian mutu pendidikan.
- b) Keterpaduan Sistem: Penting untuk menciptakan keterpaduan antara SPMI pendidikan dasar dan sistem M&E di berbagai instansi pemerintah. Hal ini akan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan pembelajaran dari M&E dapat digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan dasar secara efektif.
- c) Komitmen Pemerintah dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah perlu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan SPMI. Hasil analisis implementasi M&E dapat membantu pemerintah daerah memahami sejauh mana program-program pendidikan telah mencapai tujuannya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah struktur konseptual atau konsep dasar yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengarahkan pemikiran atau penelitian. Ini membantu seseorang dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengomunikasikan ide-ide mereka secara sistematis. Kerangka pemikiran dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penelitian ilmiah, pembuatan keputusan, perencanaan strategis, dan banyak bidang lainnya. Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif.





Data diolah peneliti 2023

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Undang-undang (UU) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara. Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan lembaga pemerintah setempat yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan program-program kesejahteraan sosial di tingkat kota Gunungsitoli, Nias. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menyediakan bantuan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, dan advokasi bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu. Mereka juga sering menjadi fokus dalam merespon bencana alam atau situasi darurat yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial Gunungsitoli berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi non-pemerintah, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Upaya kolaboratif semacam ini membantu dalam menyusun program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang ada di Kota Gunungsitoli.

Sistem Monitoring dan Evaluasi merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas serta dampak dari program-program yang mereka jalankan. Melalui sistem ini, mereka mengumpulkan data secara teratur untuk menilai sejauh mana program-program tersebut mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Monitoring dilakukan secara berkala

7
untuk mengamati perkembangan dan kinerja program secara real-time. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi masalah atau perubahan yang diperlukan selama pelaksanaan program. Informasi yang terkumpul digunakan untuk membuat perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif. Evaluasi dilakukan lebih mendalam, biasanya setelah program selesai atau pada titik tertentu dalam implementasinya. Tujuannya adalah untuk menilai dampak jangka panjang dari program, melihat apakah tujuan jangka panjang tercapai, dan mengevaluasi keberhasilan program tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem Monitoring dan Evaluasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi penggunaan dana yang efisien, mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan terkait program-program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Indikator Monitoring dan Evaluasi digunakan untuk memahami berbagai aspek dari sebuah program atau kegiatan sosial tanpa harus menggunakan struktur poin. Mereka membantu Dinas Sosial Kota Gunungsitoli untuk memantau dan mengevaluasi secara menyeluruh. Masukan (*input*) mengacu pada semua sumber daya yang digunakan dalam program, seperti dana, tenaga kerja, atau fasilitas yang disediakan untuk menjalankan kegiatan sosial. Proses (*process*) menggambarkan langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan program, termasuk strategi, kegiatan, dan metode yang digunakan. Keluaran (*output*) merujuk pada produk atau layanan konkret yang dihasilkan dari program tersebut, misalnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat atau layanan yang tersedia. Dampak (*impact*) adalah perubahan jangka panjang yang diharapkan atau diinginkan dari program tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat atau kondisi yang ingin diperbaiki. Pemantauan dan evaluasi menggunakan indikator-indikator ini untuk melacak bagaimana sumber daya digunakan, bagaimana program dijalankan, apa yang dihasilkan, dan akhirnya, dampak nyata yang diperoleh oleh masyarakat sebagai hasil dari program atau kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Pelaksanaan implementasi merupakan tahap di mana program atau kegiatan sosial dari Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dijalankan dalam kehidupan

nyata. Ini melibatkan penerapan rencana yang telah disusun sebelumnya, termasuk alokasi sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan pengelolaan proses secara keseluruhan. Selama tahap ini, berbagai langkah yang telah direncanakan akan dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tim dari Dinas Sosial akan terlibat secara aktif dalam mengoordinasikan kegiatan, mengalokasikan dana, melaksanakan program-program sosial, dan memastikan bahwa semua aspek dari program tersebut dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses implementasi ini melibatkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk staf Dinas Sosial, pihak terkait di tingkat lokal, serta masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Mereka bekerja bersama untuk memastikan bahwa tujuan dari program sosial dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selama tahap ini, pemantauan dan evaluasi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2019: 11)

Penelitian kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data. Alat pengumpulan data biasanya menggunakan pengamatan langsung, wawancara, studi dokumen. Sedangkan kesahihan dan keterandalan data menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menkankan pada makna daripada generalisasi.

3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2020:3), Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya.

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan, terdapat variabel penelitian adalah Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

Tabel 3.2
Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
Keberagaman sistem monitoring dan evaluasi menjadikan masing-masing pendekatan memiliki indikator yang	1. Masukan (<i>input</i>) 2. Proses (<i>process</i>). 3. Keluaran (<i>output</i>),

bersifat subsistem, indikator tersebut menurut (Suhato, 2010)	4. Dampak (<i>impact</i>),
---	------------------------------

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang beralamat komplek perkantoran Pemerintahan, Dahana Tabaloho, Kec, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli

3.3.1 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. (Sugiyono, 2009: 137)

3.5 Instrumen

Instrumen penelitian kualitatif menurut sugiyono (2016:305) merupakan peneliti itu sendiri. Hal ini berarti seorang peneliti menjadi alat untuk merekam informasi selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu:

1. Observasi.

Observasi merupakan teknik untuk menggali data dari sumber yang berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Melalui observasi dapat dilihat dan dapat dites kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau aktivitas. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan (Spradley dalam Sutopo, 2006: 75).

2. Wawancara.

Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan 19 harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah proses mencatat sumber daya yang digunakan, referensi yang dikonsultasikan, dan citraan yang dikutip dalam penelitian untuk memberikan pengakuan kepada pemilik informasi.

Dokumentasi merupakan dokumentasi dan rekaman yang digunakan dengan mengacu sumber-sumber yang stabil, valid, dan berguna sebagai bukti yang akurat. Dalam metode ini dilaksanakan agar memperoleh data dengan mudah berupa arsip, foto serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan guna memperoleh data dengan menggunakan dokumen yang sudah ada serta digunakan sebagai sumber pendukung dalam melakukan kegiatan penelitian. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan yang berupa literatur-literatur atau juga bisa dalam berbentuk foto maupun video. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan

wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih lengkap atau kredibel jika didukung oleh proses pendokumentasian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat pengumpulan data sedang berjalan dan ketika selepas menyelesaikan pengumpulan data pada kurun waktu tertentu. Ketika sedang melakukan wawancara peneliti harus melaksanakan analisis pada setiap tanggapan narasumber yang sedang diwawancarai. Apabila tanggapan narasumber dirasa belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang dianggap meyakinkan. Peneliti ini akan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020: 132-142) dimana terdapat empat tahapan analisis data, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Aktivitas pokok pada penelitian yaitu pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data bisa dilaksanakan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Pengumpulan data bisa dilaksanakan sehari-hari sampai berbulan-bulan sehingga didapatkan data yang banyak dan beragam.

2. Reduksi Data.

Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, jumlahnya banyak serta beragam, membuat data yang didapatkan perlu dicatat dengan teliti dan rinci, untuk kemudian direduksi. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan pola dari data. Sehingga data yang sudah direduksi dapat membuat gambaran lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data pada tahap berikutnya atau mencari data yang dibutuhkan lagi.

3. Penyajian Data.

Setelah data direduksi kemudian langkah selanjutnya dari analisis data ialah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa

dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tujuan penyajian data merupakan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari model analisis data Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif bisa jadi menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat diawal ataupun bisa jadi tidak bisa menjawab rumusan masalah itu. Karena pada penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan dinamis mengikuti perkembangan penelitian dilapangan'

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berawal dari pemekaran Kabupaten Nias pada tahun 2009, yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) Kabupaten menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Serta 1 (satu) Kota Madya yaitu Kota Gunungsitoli.

Undang-undang No.25 tahun 2005 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, maka Dinas Sosial Kota Gunungsitoli yang merupakan salah satu SKPD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Walikota Gunungsitoli No.3 tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Sekretariat membawahi 2 Sub bagian yaitu; Sub bagian Tata Usaha dan Keuangan, Sub bagian Program dan Data. Bidang terdiri dari Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi 2 (dua) seksi yaitu: Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Perlindungan Sosial. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial, membawahi 2 (dua) seksi yaitu :Seksi Rehabilitasi Sosial dan Seksi Perlindungan Jaminan Sosial. Dalam perjalannya, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli telah dipimpin oleh beberapa Kepala Dinas, dimulai dari awal hingga sekarang. Berikut urutan Kepala Dinas Kota Gunungsitoli:

1. Faoziduhu Telaumbanua
2. Olewata Zebua
3. Soziduhu Lombu
4. Fauduasa Hulu
5. Basrah Zebua
6. Hardi Telaumbanua
7. Meilinda Rostanti Larosa
8. Asieli Zega, SE
9. Everoni Mendrofa, SKM, M.Kes

10. Bonifasius Telaumbanua, SSTP, M.Si

Selanjutnya dalam tugasnya, Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli saat ini beralamat di kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli, @e-mail:dinsoskotagunungsitoli@gmail.com kode pos – 22810.

4.1.2 Visi Dan Misi

1. Visi

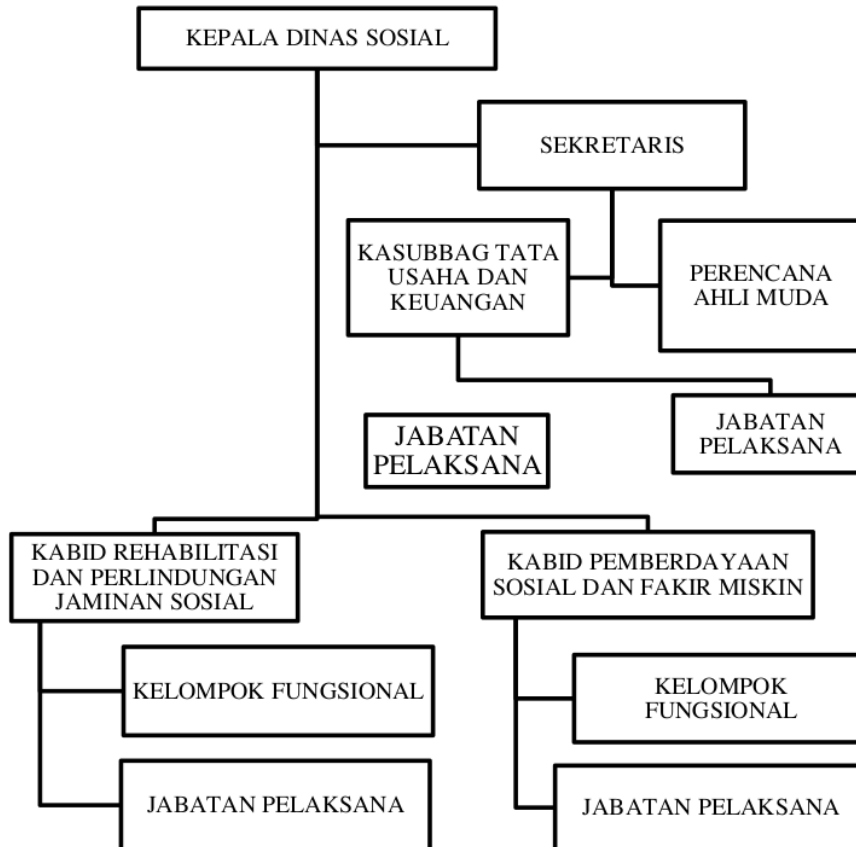
Pelayanan sosial yang berkualitas dan professional

2. Misi

- a) Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
- b) Membangun kemitraan dengan lembaga kesejahteraan sosial (LKS).
- c) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi
- d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia dinas sosial kota gunungsitoli dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli



Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Dinas Sosial

Uraian tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing jabatan di jelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
 - a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Dinas.

- c. Memimpin, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - e. Memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas pembantuan menurut ketentuan yang berlaku.
 - g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
 - h. Menghadiri/memimpin rapat/pertemuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Merumuskan, mengkoordinasi penyusunan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan tugas kedinasan secara operasional maupun administrasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
 - j. Memberi informasi, saran serta pertimbangan kepada Walikota dan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial serta di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagai bahan penerapan kebijakan Daerah.
 - k. Melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan kepegawaian pada Dinas, dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan Dinas.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup Dinas.
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

- kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas.
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
 - e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat
Menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan Dinas.
 - h. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukkan kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan dan bendahara.
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas.
 - k. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan
 - l. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia, dan
 - n. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Kasubbag Tata Usaha Dan Keuangan

- a. Kepala sub bagian tata usaha dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan terkait ketatausahaan dan keuangan.
- b. Merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha dan keuangan.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian.
- e. Menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah Dinas dan kearsipan.
- g. Menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan.
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan dan menyiapkan rapat-rapat Dinas serta pendokumentasian kegiatan Dinas.
- i. Mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara/Daerah pada lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Mengkoordinasikan penyiapan dan Reformasi Birokrasi dan System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- k. Melaksanakan urusan pembendaharaan dan gaji.
- l. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi.
- m. Melaksanakan urusan pelaporan keuangan.
- n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- o. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- q. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan,

- s. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Perencana Ahli Muda
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait program dan data.
 - b. Merencanakan kegiatan sub bagian program dan data.
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran.
 - d. Menyiapkan penyusunan laporan keterangan
 - e. Pertanggungjawaban.
 - f. Menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
 - h. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai atasan
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5. Kabid Rehabilitas Dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - a. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial penyandang disabilitas di luar panti/lembaga.

- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti/lembaga.
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial lanjut usia di luar panti/lembaga.
- d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial bencana alam.
- e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitas sosial bencana social.
- f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan jaminan sosial keluarga.
- g. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan sosial terhadap orang penderita HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- h. Mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti/ lembaga dan perlindungan sosial.
- 1 j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.
- k. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis guna peningkatan
- l. Malaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawah secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
6. Kabid Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin
- a. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas terpencil.
 - c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.
 - d. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial.
 - e. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan.
 - f. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta
 - g. Menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar Negara.
 - h. Malaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kota.
 - i. Menyelenggarakan pelaksanaan Norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penangan fakir miskin.
 - j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

- k. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik secara lisan maupun secara tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawah secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
- m. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.1.5 Deskripsi Informan (*key Informant*)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa informan (*key Informant*) untuk diteliti, maka yang menjadi informan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Informan (*Key Informan*)

No	Nama	Jabatan
1	Damai Hati Laoli, S.STP NIP: 199307062015071001	Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial
2	Rohmeni Kristina Telambanua, S.E Nip: 198305222011012005	Pelaksana
3	Selfisleksiani Zebua, ST.,M.M NIP.198401242011012028	Kelompok Fungsional Penyuluh Soosial Ahli Muda

Sumber data olahan peneliti 2024

Pemilihan informan dalam penelitian sangat penting dan perlu didasarkan pada pertimbangan tertentu. Berikut adalah beberapa alasan yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih informan tersebut:

1. Damai Hati Laoli, SSTP (Kabid Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial)

- 1) Jabatan Strategis; Sebagai Kepala Bidang Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial, Damai Hati Laoli memiliki wawasan dan informasi mendalam tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
 - 2) Keahlian di Bidang Terkait: Damai Hati Laoli SSTP (Sarjana Sosial dan Kesejahteraan) menunjukkan keahlian di bidang sosial, yang dapat memberikan perspektif yang kaya terkait dengan evaluasi sistem di bidang jaminan sosial.
2. Rohmeni Kristina Telambanua S.E (Pelaksana)
- 1) Pengalaman Langsung; Sebagai seorang pelaksana, Rohmeni Kristina Telambanua SE memiliki pengalaman langsung dalam penggunaan dan implementasi sistem monitoring dan evaluasi di tingkat operasional.
 - 2) Wawasan Terkait Pelaksanaan Lapangan; Informasi dari pelaksana dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut berfungsi di lapangan dan apakah ada hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
3. Selfisleksiani Zebua, ST.,M.M (Kelompok Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda)
- 1) Kemampuan Ahli Muda; Dengan gelar Sarjana Teknik dan Magister Manajemen, Selfisleksiani Zebua dapat memberikan pandangan unik terkait dengan sistem monitoring dan evaluasi dari sudut pandang manajemen dan kemungkinan memberikan perspektif inovatif.
 - 2) Peran Penyuluhan Sosial; Sebagai Penyuluh Sosial, Selfisleksiani Zebua dapat memberikan wawasan tentang cara menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait sistem monitoring dan evaluasi.

Pemilihan informan di atas dilakukan untuk mencakup berbagai peran dan perspektif yang berbeda dalam implementasi sistem monitoring dan evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, sehingga dapat

memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang keberhasilan serta kendala yang terjadi dalam konteks tersebut.

4.2 Hasil

1. Survei dan wawancara di lapangan

Survei dan wawancara di lapangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan atau partisipan di lokasi fisik tertentu, seperti tempat umum, Pemerintah/perusahaan, atau wilayah geografis tertentu. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, untuk memahami perilaku, pendapat, dan kebutuhan masyarakat.

Survei di lapangan melibatkan pengumpulan data dari sejumlah informan dengan menggunakan formulir. Tim peneliti mendatangi lokasi yang telah ditentukan sebelumnya dan secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan atau memberikan survey untuk diisi sendiri. Proses ini peneliti untuk mendapatkan data yang spesifik dan akurat karena mereka dapat memberikan klarifikasi langsung jika diperlukan.

Wawancara di lapangan melibatkan interaksi langsung antara pewawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Tim peneliti bertemu untuk melakukan wawancara, yang bisa bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Wawancara di lapangan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tanggapan informan, mengajukan pertanyaan tambahan, dan memahami konteks yang lebih dalam. Mengumpulkan Data *Real-Time*; Metode ini pengumpulan data secara langsung dari lapangan, memberikan gambaran *real-time* tentang situasi atau persepsi informan. Survei dan wawancara di lapangan, peneliti untuk menjelajahi dan memahami konteks lokal yang mempengaruhi hasil penelitian. Dalam beberapa kasus, survei di lapangan dapat digunakan untuk memvalidasi hasil survei lainnya atau memberikan wawasan tambahan.

Melakukan survei dan wawancara di lapangan dapat memakan biaya dan waktu lebih banyak daripada metode penelitian lainnya.

Keterbatasan jumlah informan dapat menjadi tantangan, terutama jika populasi target tersebar luas atau sulit diakses. Beberapa informan memberikan jawaban yang diharapkan daripada jawaban yang sesungguhnya. Survei dan wawancara di lapangan sering digunakan secara bersamaan atau sebagai tambahan untuk metode penelitian lainnya, seperti survei online atau analisis data sekunder, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

2. Pemantauan Teratur

Pemantauan teratur suatu konsep atau praktik yang melibatkan pengawasan atau pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap suatu aktivitas, kondisi, atau proses. Tujuan dari pemantauan teratur adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan konsisten tentang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu. Pemantauan teratur dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti lingkungan alam, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya.

Hasil dari pemantauan teratur mencakup data dan informasi yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau kejadian. Hasil ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan tindakan yang tepat, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin terjadi. Tindakan pemantauan teratur memberikan keuntungan dalam mengumpulkan data secara berkesinambungan, peneliti atau pengambil keputusan untuk mengamati perubahan seiring waktu. Dengan mendapatkan wawasan yang mendalam melalui pemantauan berulang, pihak terkait dapat mengidentifikasi faktor pemicu, menyusun strategi adaptasi, dan mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang diambil.

Hasil pemantauan teratur dapat memberikan dasar untuk analisis prediktif, para pengambil keputusan untuk meramalkan potensi perubahan mendatang atau risiko yang muncul. Pemantauan teratur juga pengenalan pola atau tren yang tidak terlihat secara langsung. Selain itu, hasil pemantauan teratur dapat digunakan untuk memvalidasi atau menyanggah

asumsi yang telah ada sebelumnya. Dengan menghadirkan data yang konsisten dan dapat diandalkan, para pengambil keputusan dapat memperbaiki model atau kerangka kerja mereka, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil didukung oleh realitas yang teramati.

3. Potensi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program

a. Pemantauan *Real-time*

Dinas Sosial telah mengimplementasikan sistem monitoring yang memungkinkan identifikasi permasalahan secara cepat dan *real-time*. Sistem ini memberikan kemampuan untuk merespons perubahan situasi dengan segera, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif pada pelaksanaan program.

b. Deteksi Dini Potensi Masalah

Melalui pemantauan yang efektif, Dinas Sosial mampu mendeteksi dini potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran program. Contohnya, ketidaksesuaian dengan anggaran atau perbedaan dengan rencana awal dapat diidentifikasi dan diatasi sebelum menjadi masalah yang lebih serius.

c. Optimasi Rencana dan Anggaran

Informasi yang diperoleh dari sistem monitoring membantu dalam mengoptimalkan rencana dan anggaran. Dengan mengetahui potensi masalah, dinas dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien.

d. Peningkatan Transparansi

Pemantauan *real-time* juga turut berkontribusi pada peningkatan transparansi pelaksanaan program sosial, memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa program dijalankan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.

e. Kesempatan untuk Perbaikan Berkelanjutan

Dengan mengetahui potensi masalah dan hambatan, Dinas Sosial dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di masa depan.

4. Potensi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program

Pelaksanaan program dinas sosial seringkali dihadapi oleh beberapa potensi masalah dan hambatan. Beberapa di antaranya melibatkan aspek organisasi, kebijakan, dan faktor masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi masalah dan hambatan yang terjadi:

a. Keterbatasan Anggaran

Program sosial tidak dapat mencapai sasaran optimal karena keterbatasan dana yang dialokasikan. Ini dapat membatasi cakupan dan efektivitas program.

b. Tata Kelola dan Manajemen

Kurangnya tata kelola yang baik dan manajemen yang efektif dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan program. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam implementasi dan distribusi bantuan.

c. Ketidaksesuaian Kebijakan

Kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak memperhitungkan dinamika sosial lokal dapat menyebabkan ketidakefektifan program.

d. Ketidakjelasan Sasaran

Jika sasaran program tidak jelas atau tidak terukur dengan baik, hasil yang diinginkan sulit dicapai. Evaluasi kinerja program menjadi sulit dilakukan.

e. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat mengurangi alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial, dan dampak positif program dapat terhambat.

f. Ketidaksetaraan Akses

Jika program sosial tidak merata dalam pendistribusian manfaatnya, maka dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi.

- g. Ketidakpartisipasian Masyarakat
Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberlanjutan program. Penerima manfaat yang tidak terlibat dapat mengurangi efektivitas program dalam jangka panjang.
- h. Kurangnya Evaluasi dan Pemantauan
Tanpa evaluasi dan pemantauan yang baik, sulit untuk menilai keberhasilan program, membuat perbaikan, dan memastikan keberlanjutan.

5. **Kepemimpinan sebagai Faktor Kunci untuk Kesuksesan Implementasi**

Kepemimpinan memainkan peran kunci dalam kesuksesan implementasi suatu inisiatif atau proyek. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, memotivasi, dan memimpin tim menuju pencapaian tujuan organisasi. Beberapa penjelasan dan temuan penelitian terkait dengan peran kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam kesuksesan implementasi;

- a. Visi dan Kepemimpinan Transformasional
Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi timnya dengan kepemimpinan transformasional berhasil dalam mengimplementasikan perubahan. Kepemimpinan transformasional melibatkan kemampuan untuk merancang dan mengkomunikasikan visi yang memotivasi orang untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Kepemimpinan Situasional
Teori kepemimpinan situasional menunjukkan bahwa pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang dihadapi.
- c. Dukungan Organisasi
Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari puncak organisasi sangat penting untuk kesuksesan implementasi. Pemimpin perlu mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa implementasi dapat berjalan lancar.

d. Kepemimpinan Partisipatif

Melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap implementasi. Kepemimpinan partisipatif menciptakan iklim di mana ide-ide kreatif dan solusi inovatif dapat muncul dari seluruh tim.

e. Komunikasi Efektif

Komunikasi yang jelas dan terbuka dari pemimpin kepada anggota tim sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan komunikasi dapat menyebabkan ketidakpastian di antara anggota tim, yang dapat menghambat implementasi.

f. Pengelolaan Perubahan

Pemimpin perlu memiliki keterampilan pengelolaan perubahan yang baik. Mampu mengidentifikasi resistensi perubahan dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah aspek penting dari kepemimpinan.

g. Pengukuran dan Evaluasi

Kepemimpinan yang efektif melibatkan pengukuran dan evaluasi terus-menerus terhadap progres implementasi. Pemimpin perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah atau perubahan yang diperlukan selama proses implementasi.

6. Keberhasilan Implementasi, Kebutuhan Organisasi

Keberhasilan implementasi di dalam sebuah organisasi dapat diukur oleh sejauh mana tujuan dan harapan yang diinginkan dari implementasi tersebut tercapai. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi melibatkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan organisasi. beberapa poin yang dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan implementasi dan kebutuhan organisasi:

a. Pemahaman Kebutuhan Organisasi

Sebelum memulai implementasi suatu perubahan atau proyek, penting untuk memahami dengan baik kebutuhan dan tujuan organisasi. Ini melibatkan identifikasi masalah yang perlu dipecahkan, peluang yang perlu dimanfaatkan, dan harapan yang ingin dicapai.

- b. Kesesuaian dengan Strategi Organisasi
Implementasi yang berhasil harus sejalan dengan strategi keseluruhan organisasi. Rencana implementasi harus mendukung visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi agar dapat memberikan nilai tambah yang sesuai.
- c. Dukungan dari Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan internal dan eksternal perlu mendukung implementasi. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, membangun konsensus, dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi.
- d. Sumber Daya yang Tersedia
Kebutuhan organisasi termasuk sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung perubahan atau proyek yang dijalankan.
- e. Budaya Organisasi
Budaya organisasi memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi. Jika budaya mendukung perubahan dan inovasi, implementasi kemungkinan besar akan berjalan lebih lancar.
- f. Monitoring dan Evaluasi
Kebutuhan organisasi untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan implementasi secara berkala. Ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
- g. Fleksibilitas dan Adaptabilitas
Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi lebih mungkin mencapai keberhasilan implementasi. Kesiapan untuk menyesuaikan rencana implementasi dengan perubahan kebutuhan atau kondisi pasar juga sangat penting.

7. Perbaikan Program, Penyesuaian Program

- a. Evaluasi Kebutuhan Masyarakat

Lakukan evaluasi terkini terhadap kebutuhan masyarakat. Identifikasi masalah-masalah sosial yang mungkin muncul atau perubahan kebutuhan masyarakat yang belum tercakup oleh program saat ini.

b. Konsultasi dengan Stakeholder

Libatkan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan (stakeholder), seperti masyarakat setempat, organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Dapatkan masukan mereka untuk memahami kebutuhan yang lebih baik.

c. Analisis Data dan Kinerja

Tinjau data kinerja program saat ini. Evaluasi sejauh mana program telah berhasil atau mengalami kendala. Identifikasi area di mana perubahan diperlukan.

d. Penyesuaian Anggaran

Tentukan apakah diperlukan penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang baru. Lakukan perhitungan dan alokasikan sumber daya secara efisien untuk mendukung perubahan program.

e. Peningkatan Teknologi

Perhatikan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Implementasikan sistem informasi atau aplikasi yang dapat membantu dalam pelacakan, pelaporan, dan manajemen data.

f. Pelibatan Komunitas

Aktif melibatkan komunitas dalam perancangan dan pelaksanaan program. Dengan melibatkan mereka, program dapat lebih baik menanggapi kebutuhan unik dan beragam di masyarakat.

g. Pengembangan Keterampilan

Berikan pelatihan kepada staf dan relawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung perubahan program.

h. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Tetap lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Gunakan hasil evaluasi untuk membuat penyesuaian lebih lanjut dan memastikan program terus memenuhi kebutuhan masyarakat.

8. Tindakan perbaikan cepat

Tindakan perbaikan cepat pada program di Dinas Sosial dapat mencakup langkah-langkah berikut:

- a. Identifikasi masalah atau kebutuhan mendesak yang perlu ditangani segera. Lakukan rapat darurat atau pertemuan cepat dengan tim terkait untuk merancang solusi sementara.
- b. Libatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat setempat dan organisasi non-pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan masukan dan dukungan secepat mungkin.
- c. Periksa anggaran dan alokasi sumber daya yang tersedia. Sesuaikan alokasi anggaran untuk mendukung tindakan perbaikan cepat tanpa menghambat kelangsungan program jangka panjang.
- d. Gunakan teknologi yang ada untuk meningkatkan efisiensi, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem informasi yang sudah ada untuk mempercepat pemantauan dan pelaporan.
- e. Perkuat koordinasi internal di antara tim program dan pihak-pihak terkait untuk memastikan informasi dan tindakan dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
- f. Komunikasikan perubahan atau tindakan perbaikan kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan mudah dipahami. Informasikan langkah-langkah yang diambil dan manfaatnya untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- g. Pastikan tim pelaksana memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengimplementasikan perubahan dengan cepat. Lakukan pelatihan singkat jika diperlukan.
- h. Lakukan pemantauan langsung terhadap implementasi perbaikan cepat dan terus evaluasi efektivitasnya. Siapkan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.

- i. Tetap terbuka terhadap umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait, dan gunakan umpan balik tersebut untuk membuat perbaikan lebih lanjut secara berkelanjutan.

9. Jumlah Personel Terlatih

Jumlah personel terlatih dalam suatu organisasi, Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, merupakan aspek penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program. Personel terlatih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial, memberikan layanan yang berkualitas, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan memiliki jumlah personel yang memadai dan terlatih, organisasi dapat meningkatkan kapasitas dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Pelatihan dapat melibatkan aspek-aspek seperti pemahaman mendalam terhadap isu-isu sosial, keterampilan komunikasi yang baik, manajemen program, dan penggunaan teknologi yang mendukung.

Personel yang terlatih juga dapat meningkatkan daya saing organisasi dalam mencari sumber daya dan pendanaan, karena dapat mendemonstrasikan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, dengan personel yang terus diperbarui pengetahuan dan keterampilannya, organisasi dapat tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan dalam bidang sosial. Juga penting untuk memastikan bahwa pelatihan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan isu-isu sosial dan kebijakan terkini. Hal ini dapat mencakup pelatihan reguler, lokakarya, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya. Dengan demikian, organisasi dapat memiliki personel yang tidak hanya memiliki dasar keterampilan, tetapi juga terus mengembangkan diri untuk tetap menjadi sumber daya yang berharga dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

10. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, LSM, Masyarakat

Kolaborasi antara Dinas Sosial dengan Pemerintah Daerah, LSM, dan masyarakat adalah pendekatan yang efektif dalam mengatasi masalah sosial dan memberikan dukungan yang holistik kepada masyarakat. Melalui kerja sama ini, organisasi dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Pemerintah daerah memiliki wawasan yang mendalam tentang kondisi lokal dan kebijakan yang dapat mendukung atau menghambat upaya Dinas Sosial. Kerja sama dengan LSM membuka peluang untuk memperluas cakupan dan efektivitas program sosial. LSM sering kali memiliki jaringan dan pengetahuan mendalam tentang masalah-masalah spesifik dan dapat memberikan bantuan tambahan dalam implementasi program.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program meningkatkan partisipasi dan penerimaan program di tingkat lokal. Masyarakat memiliki wawasan unik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, sehingga kolaborasi dapat memastikan bahwa solusi yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan bekerjasama, pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat dapat saling mendukung, menciptakan sinergi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Kolaborasi ini memperkuat kapasitas untuk merespons dinamika sosial yang kompleks dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat komunitas.

11. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*) merupakan suatu proses di mana suatu organisasi atau proyek berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau dampak terhadap aktivitas atau keberhasilan. Pemangku kepentingan dapat mencakup berbagai kelompok seperti karyawan, pelanggan, mitra bisnis, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Keterlibatan pemangku kepentingan

menjadi kunci dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam keterlibatan pemangku kepentingan:

- a. Menentukan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap organisasi atau proyek.
- b. Menganalisis sejauh mana setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan dalam kegiatan atau hasil, serta sejauh mana pengaruh mereka terhadap keberhasilan atau kegagalan.
- c. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai progres, kebijakan, atau perubahan yang terjadi.
- d. Memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka.
- e. Mengelola konflik atau perbedaan pendapat antara pemangku kepentingan dengan cara yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- f. Menanggapi umpan balik dari pemangku kepentingan dengan cepat dan efektif, menunjukkan keseriusan organisasi terhadap perhatian dan kepentingan mereka.
- g. Memantau dan mengevaluasi tingkat keterlibatan pemangku kepentingan secara berkala, dan melakukan perubahan strategi jika diperlukan.

12. Pengukuran Pencapaian Target

Pengukuran pencapaian target adalah proses evaluasi dan pemantauan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi atau proyek berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kinerja untuk menentukan sejauh mana pencapaian target sesuai dengan yang direncanakan. Beberapa langkah dan konsep yang terkait dengan pengukuran pencapaian target:

- a. Menetapkan tujuan dan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu-batasan.
- b. Menetapkan indikator kinerja atau KPI yang dapat diukur untuk menilai pencapaian target. Ini dapat mencakup metrik seperti penjualan, kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, atau lainnya tergantung pada jenis organisasi atau proyek.
- c. Melakukan pemantauan secara teratur dan mengumpulkan data yang relevan terkait dengan indikator kinerja untuk memahami perkembangan pencapaian target.
- d. Menganalisis data kinerja untuk mengidentifikasi tren, pola, dan variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian target. Ini dapat melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi atau proyek telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Ini dapat melibatkan perhitungan persentase pencapaian atau perbandingan nilai aktual dan target.
- f. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara hasil aktual dan target, mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan korektif. Ini bisa melibatkan penyesuaian strategi, perbaikan proses, atau pengoptimalan sumber daya.
- g. Melaporkan hasil pencapaian target kepada pemangku kepentingan dan pihak yang berkepentingan, termasuk rencana perbaikan dan strategi ke depan.
- h. Menetapkan siklus pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi atau proyek terus mengukur dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu.

4.3 Analisis Hasil Pembahasan

4.3.1 Implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efektivitas program-program sosial dan pelayanan yang diselenggarakan. Dengan adanya

sistem monitoring, Dinas Sosial dapat secara lebih efisien mengumpulkan data terkait pelaksanaan program, mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang mungkin muncul, serta mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan. Menurut Carlsson dan Kallinikos (2018), implementasi sistem monitoring mencakup pembuatan dan pengaturan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dibahas dalam implementasi tersebut:

1. Tujuan dan Lingkup Sistem Monitoring

a. Tujuan Utama

Identifikasi tujuan utama dari sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. termasuk pemantauan efektivitas program bantuan sosial, pemantauan kondisi sosial masyarakat, atau pemantauan capaian target tertentu.

b. Lingkup Monitoring

Memastikan bahwa program-program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Sosial mencapai tujuan yang efektif. Mengawasi dan menganalisis kondisi sosial masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesejahteraan. Memberikan data dan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Monitoring pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk alokasi dana, distribusi bantuan, dan dampaknya pada penerima manfaat.

4.3.2 Keterbatasan Sumber Daya dalam Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi merujuk pada kendala-kendala yang timbul akibat keterbatasan dalam aspek tertentu, seperti keuangan, tenaga kerja, waktu, atau teknologi, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara optimal.

Keterbatasan sumber daya, terutama dana dan waktu, dapat membatasi cakupan dan mendalamnya kegiatan monitoring dan evaluasi. Dalam bukunya "*Utilization-Focused Evaluation*," ia menekankan perlunya membuat pilihan yang cerdas dalam alokasi sumber daya yang terbatas Michael Quinn Patton (2014). Ada 2 keterbatasan sumber daya yakni;

1. Keterbatasan Keuangan

Analisis mengenai alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Keterbatasan keuangan dapat mempengaruhi kemampuan Dinas Sosial dalam mengakses teknologi, pelatihan staf, dan kegiatan pemantauan.

2. Sumber Daya Manusia

Eksplorasi terhadap keterbatasan jumlah dan kualifikasi staf yang terlibat dalam kegiatan monitoring. Sumber daya manusia yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi secara menyeluruh.

4.3.3 Faktor Pendukung Implementasi Sistem Monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

pentingnya ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk keuangan, teknologi, atau tenaga kerja, untuk mendukung implementasi sistem monitoring secara efektif Bamberger & Rugh, (2006)

1. Kesadaran Organisasi

Analisis mengenai tingkat kesadaran dan pemahaman organisasi terhadap pentingnya sistem monitoring. Sejauh mana kesadaran ini mendukung integrasi sistem monitoring dalam kebijakan dan praktik harian.

2. Teknologi yang Tersedia

Eksplorasi terhadap infrastruktur teknologi yang telah diterapkan. Bagaimana teknologi yang ada dapat menjadi faktor pendukung atau hambatan dalam implementasi sistem monitoring.

3. Keterlibatan Pemangku Kunci

Penelitian mengenai sejauh mana pemangku kepentingan di Dinas Sosial terlibat dalam proses implementasi. Bagaimana keterlibatan mereka dapat meningkatkan efektivitas sistem monitoring.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi sistem monitoring di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli merupakan langkah positif untuk meningkatkan efektivitas program-program sosial dan pelayanan masyarakat. Adapun beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam analisis hasil pembahasan yakni;

1. Tujuan dan Lingkup Sistem Monitoring

Identifikasi tujuan utama sistem monitoring seperti pemantauan efektivitas program bantuan sosial, kondisi sosial masyarakat, atau pencapaian target tertentu. Memastikan lingkup monitoring mencakup semua program bantuan sosial dan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat yang relevan.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan keuangan dapat mempengaruhi akses terhadap teknologi, pelatihan staf, dan pelaksanaan kegiatan pemantauan. Keterbatasan sumber daya manusia, baik jumlah maupun kualifikasi staf, dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan evaluasi menyeluruh.

3. Faktor Pendukung Implementasi

Kesadaran organisasi terhadap pentingnya sistem monitoring perlu diukur untuk mendukung integrasi sistem dalam kebijakan dan praktik harian. Infrastruktur teknologi yang ada perlu dieksplorasi untuk memahami sejauh mana teknologi dapat mendukung atau menjadi hambatan. Keterlibatan pemangku kunci dapat meningkatkan efektivitas sistem monitoring, sehingga perlu diberikan perhatian khusus.

5.2 Saran

1. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi agar dapat mengatasi keterbatasan keuangan. Mengidentifikasi sumber daya alternatif atau potensi mitra keuangan yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan tersebut.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi mereka dalam melaksanakan

kegiatan monitoring dan evaluasi. Meninjau kebutuhan staf dan mempertimbangkan perekrutan tambahan jika diperlukan.

3. Melakukan kampanye internal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran organisasi terhadap pentingnya sistem monitoring. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur organisasi mencerminkan komitmen terhadap implementasi sistem monitoring.
4. Mengevaluasi dan memperbarui infrastruktur teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan monitoring dan evaluasi. Mengidentifikasi solusi teknologi yang inovatif untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.
5. Mengadakan forum atau pertemuan rutin dengan pemangku kunci untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam implementasi sistem monitoring. Membangun kerja sama aktif dengan pihak terkait untuk memastikan dukungan penuh dalam melaksanakan kegiatan monitoring.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dapat meningkatkan efektivitas sistem monitoringnya, mengatasi keterbatasan sumber daya, dan mencapai tujuan program-program bantuan sosial secara lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., & Wahyudi, S. (2018). The Effect of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study in Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. In International Conference on Public Organization (pp. 49-57). Atlantis Press.
- Aljughaiman, A. M. (2018). Impact of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study of the Saudi Arabian General Investment Authority. *International Journal of Business and Management*, 13(9), 25-36.
- Asres, A. G. (2017). Monitoring and Evaluation System and Its Impact on Employee Performance: The Case of Ethiopian Revenues and Customs Authority. *Journal of Business and Management*, 19(3), 36-45.
- Azis, R. (2016). *Pengantar administrasi pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Sibuku.
- Joko Pramono. S.Sos., M. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: UNISRI Press.
- Jokowi, S. M. (2019). Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Dinas Sosial Kabupaten Gunungsitoli. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 123-134.
- Kurniawan, D. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1), 78-90.
- Mardiyanto, D., & Raharjo, K. (2019). Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 17(1), 56-68.
- Nuryanti Mustari, S. M. (2015). *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Prajitno, D. (2018). Analisis Pengaruh Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(3), 34-45.

- Sitorus, R. P., & Salim, N. S. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pemerintahan*, 8(2), 89-102.
- ⁶ Suhardan, D., Suharto, N., Irianto, Y.B. (2017). *Manajemen pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Widoyoko, E. P. (2017). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widayat, W., & Sumiyati, S. (2019). The Influence of Monitoring and Evaluation System on Employee Performance: A Case Study in the Ministry of Social Affairs. *Journal of Public Administration and Governance*, 9(2), 21-35.
- Yulianto, B., & Sari, R. K. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 67-79.

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PADA DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	gunungsitolikota.go.id Internet Source	6%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
4	repository.dinamika.ac.id Internet Source	2%
5	arpusda.semarangkota.go.id Internet Source	1%
6	serupa.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

10

repository.unika.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PADA DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64
